

**PERAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DALAM UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PEMALSUAN SURAT-SURAT KENDARAAN
BERMOTOR
(Studi di SAMSAT UPTB Kota Manado)**

**PHYLIA BAWANGO
PATAR RUMAPEA
JERICHO. D. POMBENGI**

Abstract: This research aims to explain about the role of technical implementing unit of Manado city or samsat Manado in preventing and overcoming counterfeiting of motor vehicle letters. This research uses descriptive method of qualitative approach, and data collection technique done by observation, interview technique, and documentation. The number of informants as many as 10 people. In this research using the measurement of duties and functions of the samsat office in terms of where the approach of this process include (i) planning, (ii) coordination, (iii) coaching, (iv) control of service tasks. The result of the research shows that the role of samsat manado in prevention against counterfeiting of motor vehicle letters is : a. Conducting motor vehicle document research by conducting cross check against frame number and engine number to motor vehicle; b. Receive and examine the results of physical inspection of motor vehicles to be adjusted to the documents of motor vehicles; c. The selection of good safety signs in the motor vehicle letters, so that the letter of the motor vehicle is difficult to forge. Countermeasures of criminal counterfeiting of letters conducted by samsat Manado party by blocking motor vehicle letters. The role of samsat in this case only as an informant only. Samsat has no authority in investigating cases of counterfeiting of motor vehicles letters. Samsat still cooperate with the police if the police still need the help of samsat for completeness of ranmor files or as expert witnesses.

Keywords : Role, SAMSAT, Counterfeiting

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan birokrasi/pemerintah kepada masyarakat. Pelaksana pelayanan publik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Karena pada hakekatnya pemerintah merupakan abdi masyarakat atau public servant. Sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang dan jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemampuan dalam pembuatan kebijakan dan fungsi manajemen, struktur

organisasi dan penerapan etika sangat diperlukan oleh para administrator agar dapat menyediakan barang dan jasa publik yang profesional.

Peran kelembagaan pemerintahan dalam pelayanan publik yang berkualitas berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan saja.

Pengendalian pengawasan tidak dapat terlepas dari aspek pentingnya kendaraan bermotor. kepemilikan kendaraan bermotor dianggap tidak sah karena masih kurangnya kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki kendaraan bermotor tersebut. Ketidaklengkapan surat tersebut dapat diakibatkan oleh terjadinya pembelian kendaraan bermotor yang

diduga hasil pencurian kendaraan bermotor. Agar kendaraan bermotor dapat dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum maka diperlukan suatu alat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang telah di atur dalam Undang-Undang. Salah satu bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan resmi adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Untuk itu dibutuhkannya peran serta BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang sangatlah penting, karena dengan adanya BPKB ini dapat terlihat peran SAMSAT tentang asal usul kendaraan bermotor tersebut. Namun tidak jarang surat sah kepemilikan kendaraan bermotor ini ditemui palsu. Jadi yang dimaksud dengan BPKB adalah buku kepemilikan kendaraan bermotor yang dijadikan bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, dan

LANDASAN TEORI

Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Soekanto, 2012 berpendapat bahwa “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”.

Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan stastus yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani, 2012)

Menurut (Soekanto, 2012) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi :

diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor serta tanda nomor kendaraan bermotor.

Dengan demikian dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam SAMSAT seperti kepolisian dan badan retribusi dan pengelolaan pajak daerah serta PT. Jasa Raharja juga laporan dari masyarakat (pemilik kendaraan bermotor). Agar pemalsuan surat kendaraan bermotor dapat di minimalisasi dan tuntas. Dengan upaya pencegahan dan penanggulangan sesuai dengsn kewenangan samsat. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat masalah pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dalam suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul: “Peran Samsat dalam pencegahan dan penanggulangan pemalsuan pajak kendaraan” (studi di Kantor Samsat Manado).

- a) Cara(Usage); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
- b) Kebiasaan (folkways), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
- c) Tata kelakuan (mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
- d) Adat istiadat (custom), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. (Soekanto, 2012).

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas. Dari beberapa pengertian di atas, dapat di ketahui bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan SAMSAT, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang SAMSAT.

METODE PENELITIAN

Ada beberapa macam metode dalam penelitian, salah satunya yang diterapkan pada penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moelong (2010) didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilakunya yang dapat diamati. Dalam Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009) paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan realitas atau setting yang holistik, kompleks dan rinci.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana peneliti akan menggambarkan bagaimana Tugas dan fungsi Kantor SAMSAT Kota Manado yang menjadi indikator yaitu, perencanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian tugas pelayanan

Focus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Fokus penelitian dimaksudkan untuk memberi studi

kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. (Moelong : 2010).

Penelitian ini juga didesain untuk memperoleh informasi yang objektif, penelitian ini berfokus pada peran dari kantor sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah pemalsuan surat kendaraan bermotor di unit pelaksanaan teknis badan (UPTB) Manado yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi, suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan berdasarkan dari tugas dan fungsi dari kantor samsat antara lain :

Perencanaan

Perencanaan disini berbicara mengenai tugas dari kantor Samsat UPTB Manado dalam melaksanakan tugas dari dinas badan pengelolaan pajak retribusi daerah khususnya kota manado tentang membayar pajak kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah dan dari perencanaan yang dibuat oleh Samsat Manado dalam mensosialisasikan tentang rutin membayar pajak dan untuk pengecekan STNK kendaraan karena banyaknya kendaraan yang belum daftar ulang, artinya belum membayar pajak 5 tahunan

Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja dalam instansi dalam pelaksanaan pelayanan publik agar meminimalisasi pemalsuan

Pembinaan

Pembinaan yang kami lakukan berupa bimbingan teknis secara bersama-sama guna menjelaskan cara kerja yang dilakukan saat penemuan pemalsuan dan cara

menanggulangnya dengan memblokir surat kendaraan tersebut.

Pengendalian Tugas Pelayanan

Pengendalian tugas pelayanan untuk mencegah pemalsuan yang dilakukan oleh samsat yaitu dengan pengawasan setiap lima tahun kendaraan harus di cek fisik, memperketat persyaratan untuk pencetakan STNK, dan meningkatkan sistem pelayanan masyarakat. Sedangkan untuk menanggulangi pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, samsat melakukan upaya antara lain mengadakan penelitian dokumen kendaraan bermotor dengan mengadakan cross cek terhadap nomor rangka dan nomor mesin yang spesifikasi dengan faktur dan BPKB ranmor tersebut, bekerja sama dengan masyarakat agar kasus pemalsuan dapat diminimalisasi

Informan

Dalam suatu penelitian tentunya di perlukan informan sebagai narasumber atau tempat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu dengan beberapa informan yang terdiri atas unsur sebanyak 5(lima) orang, dan unsur masyarakat sebanyak 5 (lima) orang jadi jumlah informan sementara adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari :

1 (satu) orang Kepala Kantor SAMSAT Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kota Manado.

5 (enam) orang Pegawai Kantor SAMSAT Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kota Manado.

4 (tiga) orang dari masyarakat.

Metode Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelahan dokumen (Moleong, 2010). Berdasarkan pendapat tersebut maka instrumen utama penelitian ini ialah peneliti sendiri,

sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Observasi, biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian dalam penelitian ini observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi berperan pasif dimana peneliti kehadirannya dalam melakukan observasi tidak diketahui oleh subjek yang diamati. Peneliti hanya mendatangi lokasi, tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif. (Sutopo, 2002).

Wawancara, digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara mendalam. Menurut (Sutopo, 2002) wawancara mendalam merupakan yang tidak struktur, karena peneliti merasa perlu melakukan wawancara mendalam untuk mencari informasi yang jelas dan akurat. Maka dari itu, dilakukan wawancara dengan pertanyaan yang bersifat "open ended" dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur guna mengenali pandangan subjek yang bermanfaat bagi penelitian ini.

Pengumpulan data dengan dokumentasi, Menurut (Sutopo, 2002) dokumentasi merupakan sumber data yang memiliki peran penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa memiliki beragam bentuk dari yang tertulis sederhana sampai pada yang lebih lengkap seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif yaitu teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang terjadi secara bersama (Sutopo, 2002).

Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Reduksi Data

Mereduksi data merupakan komponen pertama yang dilakukan dalam analisis yang meliputi proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian masih dilakukan. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data. Artinya reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan (meski mungkin tidak disadari sepenuhnya) tenaga kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian, dan juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan (Sutopo, 2002). Pada waktu pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh di lapangan. Dalam menyusun ringkasan tersebut peneliti juga membuat coding, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan, dan juga menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai disusun. (Sutopo, 2002).

Penyajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini berupa rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga akan mudah dipahami. (Sutopo, 2002).

Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. Semua itu dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dapat dimengerti dalam bentuk yang lebih kompak. (Sutopo, 2002).

Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemui bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sutopo, 2002).

Hasil Penelitian

Setelah dirangkum, hasil penelitian kemudian akan di deskripsikan sesuai dengan indikator sesuai fungsi dari dari kantor samsat kota manado yakni sebagai berikut :

Perencanaan

Perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan-hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hasil yang dikehendaki. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh usaha kantor samsat mengenai cara menghubungkan fakta yang ada dengan yang lain dalam menangani atau meminimalisir juga menaggulangi kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor berupa STNK dan notice pajak di kota manado sesuai dengan kewenangan kantor samsat yaitu memblokir surat kendaraan tersebut serta akan di buat laporan mengenai pemalsuan surat seperti ini, jika menemukan adanya kendaraan yang tidak sesuai dengan database berdasarkan nomor rangka dan mesin dan tidak akan diblokir jika sudah membayar kembali pajak sesuai berapa lamanya kendaraan itu belum dibayar, Sesuai dengan pasal 70 ayat (2) UU NO.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Tanda Kendaran Bermotor (TKB) berlaku selama 5

tahun dan setiap satu tahun wajib mendapatkan pengesahan dari kantor bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Koordinasi

Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula, menurut Sondang P. Siagian (2006;110) Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh pimpinan menjaga hubungannya dengan pegawai terlebih saat berkoordinasi tentang usaha bersama yang dibutuhkan oleh pihak samsat adanya kerjasama dari masyarakat dalam rutin untuk membayar pajak rutin di setiap lima tahun dan adanya pengesahan di setiap tahunnya agar kantor samsat dapat mendata data kendaraan di setiap tahunnya, masyarakat pun saat ini sudah dimudahkan dengan kerjasamanya kantor samsat dengan beberapa bank swasta seperti bank SulutGo dan bank BRI agar memudahkan masyarakat dalam membayar pajak agar terhindar dari pemalsuan karena dengan adanya kesadaran rutin membayar pajak dapat membantu pihak samsat dalam memperbaharui data agar terhindar dari pemalsuan stnk dan notice pajak, dan kantor samsat juga membutuhkan kerjasama berupa koordinasi dari masyarakat jika mengalami kehilangan kendaraan untuk segera melaporkan ke pihak berwenang agar dapat mencegah kesempatan pihak tidak bertanggung jawab dalam memalsukan data kendaraan, karena jika adanya kerjasama antara masyarakat dan kantor samsat dengan baik dapat mencegah terjadinya pemalsuan.

Pembinaan

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan

penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik, atau dapat dikatakan juga pembinaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan tidak ada rencana pembinaan bersifat final, tetapi selalu merupakan bahan untuk diadakan perbaikan. Oleh karena itu pembinaan bukan merupakan hasil daripada proses perencanaan, tetapi hanya sebagai laporan sementara (interiwn report). Dan Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh pimpinan melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai dalam usaha melaksanakan tugas di setiap bagiannya masing-masing agar menghasilkan hasil kerja yang maksimal, karena dengan pembinaan yang dilakukan pimpinan kepada pada pegawai ataupun kepada masyarakat diharapkan bisa menjadi suatu proses dalam mencegah terjadinya pemalsuan, karena dengan adanya informasi kepada masyarakat mengenai hukuman jika terlibat kasus pemalsuan ini yaitu mendapat hukuman pidana penjara paling lama enam tahun sesuai dengan pasal 263 pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Pengendalian Tugas pelayanan

Pengendalian manajemen tugas pelayanan dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan (applied behavioral science). Pada dasarnya, sistem ini berisi tuntutan kepada kita mengenai cara menjalankan dan mengendalikan organisasi yang “dianggap baik” berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang didalamnya juga terdapat pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh kinerja atau upaya kantor samsat dalam melaksanakan pekerjaannya dan dalam pencapaiannya serta

adanya monitoring dari, dalam hal ini pimpinan memberikan monitoring dalam kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor yang juga bekerja sama dengan dispenda pencatatan notice pajak, karena dengan adanya pengawasan yang rutin dari pimpinan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya, sedangkan Kendala samsat dalam mencegah pemalsuan surat kendaraan bermotor antara lain: a. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor yang kendaraannya hilang untuk melapor ke polisi; b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menanyakan status kendaraan yang akan dibeli sebelum terjadi transaksi jual beli pada kantor samsat; c. Kendaraan bermotor tidak bisa datang ke samsat karena berada diluar daerah. Dan untuk pencegahan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor dengan, mengadakan penelitian dokumen kendaraan bermotor dengan mengadakan cross cek terhadap nomor rangka dan nomor mesin terhadap kendaraan bermotor; Menerima dan meneliti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor untuk disesuaikan dengan dokumen kendaraan bermotor; Pemilihan tanda pengaman yang baik dalam surat kendaraan bermotor, sehingga surat kendaraan bermotor tersebut lebih sulit dipalsukan. Penanggulangan pemalsuan surat yang dilakukan oleh pihak samsat Manado yaitu dengan pemblokiran surat kendaraan bermotor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peran samsat dalam mencegah pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yaitu dengan melakukan

Perencanaan

Perencanaan yang ada pada kantor samsat manado dalam rangka pencegahan pemalsuan surat berkendaraan bermotor yaitu dilakukan

dengan beberapa rencana berupa diadakannya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat seperti sosialisasi mengenai wajib membayar pajak kendaraan bermotor, serta diadakannya kegiatan razia yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak kepolisian dan PT. Jasa Raharja serta badan pengelola pajak dan retribusi daerah. Untuk pengecekan STNK kendaraan karena banyaknya kendaraan yang belum daftar ulang, artinya belum membayar pajak 5 tahunan. Ini dilakukan untuk mencegah penggunaan kendaraan bodong yang tidak dilengkapi dengan STNK (tidak sah). Sedangkan dalam penanggulangan pemalsuan dengan memblokir STNK dan meneliti dokumen.

Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan pada kantor samsat yaitu pemberian motivasi dari pimpinan guna meningkatkan kinerja pegawai dan monitoring yang rutin dari pimpinan dalam mengawasi pelayanan yang dilakukan pegawai, seperti mengecek langsung proses pelayanan dalam ruang pegawai, dan memberikan solusi agar pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien

Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan di kantor samsat biasanya dilakukan bersama-sama antara badan pengelola pajak dan retribusi dan pengelolaan pajak daerah dan kepolisian serta PT. Jasa Raharja; dan pembinaan yang kami lakukan berupa bimbingan teknis secara bersama-sama guna menjelaskan cara kerja yang dilakukan saat penemuan pemalsuan dan cara menanggulangnya dengan memblokir surat kendaraan tersebut.

Pengendalian Tugas Pelayanan

Pengendalian tugas pelayanan untuk mencegah pemalsuan yang dilakukan oleh samsat yaitu dengan pengawasan setiap lima tahun

kendaraan harus di cek fisik, memperketat persyaratan untuk pencetakan STNK, dan meningkatkan sistem pelayanan masyarakat. Sedangkan untuk menanggulangi pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, samsat melakukan upaya antara lain mengadakan penelitian dokumen kendaraan bermotor dengan mengadakan cross cek terhadap nomor rangka dan nomor mesin yang spesifikasi dengan faktur dan BPKB ranmor tersebut, bekerja sama dengan masyarakat agar kasus pemalsuan dapat diminimalisasi, dan untuk kendaraan yang diluar daerah yang tidak bisa datang ke samsat untuk di cek fisik, maka samsat tetap melayani dengan ketentuan meminta cek fisik pada kepolisian daerah setempat dengan membawa BPKB asli guna cross cek spesifikasi nomor rangka dan nomor mesin sesuai BPKB kendaraan bermotor tersebut yang disahkan oleh kepolisian daerah setempat.

Peran samsat dalam hal ini hanya sebagai pelapor saja. Samsat tidak mempunyai wewenang dalam menyidik kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor tersebut. Samsat tetap melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian apabila pihak kepolisian masih membutuhkan bantuan Samsat untuk kelengkapan berkas-berkas kendaraan bermotor ataupun sebagai saksi ahli. Juga perlu adanya peningkatan pengawasan dari pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor agar bisa mencegah oknum-oknum tertentu untuk membuat surat palsu dalam menjual kendaraan hasil curian.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memandang perlu menyampaikan saran

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Penerbit Remadja Karya Bandung;

berkaitan dengan pencegahan dan pemalsuan surat kendaraan bermotor di kantor samsat, yaitu :

Perencanaan

lebih meningkatkan diadakannya sosialisasi yang rutin dari pihak kepolisian kepada masyarakat baik langsung kepada masyarakat atau melalui kelurahan atau kecamatan agar mengetahui hukuman dari penemuan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ini. Perlunya kerja sama yang baik antara pihak SAMSAT dan anggota masyarakat untuk dapat mengungkap kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ini.

Koordinasi

Perlu adanya koordinasi dengan kepolisian mengenai penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor agar meminimalisir kesempatan para oknum tertentu dalam membuat surat kendaraan palsu, sehingga mencegah adanya pemalsuan

Pembinaan

Perlu adanya peningkatan pembinaan pada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor secara rutin di setiap tahunnya agar data kendaraan dapat diketahui dan diperbaharui di setiap tahunnya.

Pengendalian Tugas Pelayanan

Perlunya peningkatan pengawasan dari pimpinan untuk meningkatkan sistem pelayanan pada masyarakat atau kerja sama yang baik antara pihak SAMSAT dan anggota masyarakat untuk dapat mengungkap kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ini

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis. untuk Akuntansidan Manajemen. BPFE. Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2002. Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Penegakan, Raja
Grafindo Persda, Jakarta;

Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian
Kualitatif. Surakarta : UNS Press. Hessel